

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Semester II Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2022 adalah berupa Penerimaan Pendapatan dari Pemindah tanganan sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp.4.114.358.135,- atau mencapai 96.26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.272.033.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.828.694.301,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 66.628.010,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.762.066.291,-, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.828.694.301,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 4.115.550.821,-. Kegiatan Non Operasional terdapat pendapatan dari

pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0,-. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 88.000.000,-. Kegiatan non operasional terdapat surplus Rp. 88.000.000,-, dan beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya Rp.0,-. Pos-Pos Luar Biasa untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp. (4.027.550.821,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.1.830.441.987,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (4.027.550.821,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (88.000.000,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.113.803.135,- dengan kenaikan/penurunan ekuitas Rp. (1.747.686,-) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.828.694.301-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% Realisasi	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	REALISASI
PENDAPATAN					
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI		-	-	-	62.377.900
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	-	62.377.900
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	62.377.900
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		2.057.403.000	2.151.972.076	104,60	1.044.943.072
Belanja Barang		1.950.929.000	1.819.164.261	93,25	187.700.800
Belanja Modal		143.731.000	142.666.798	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		4.152.063.000	4.113.803.135	99,08	1.232.643.872
Belanja Modal					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		4.152.063.000	4.113.803.135	99,08	1.232.643.872
Belanja Hibah					
Belanja Barang		-	-	-	-
Jumlah Belanja Hibah		-	-	-	-
TOTAL SELURUH BELANJA		4.152.063.000	4.113.803.135	99,08	1.232.643.872

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.151.972.076	1.044.943.072
Beban Persediaan	D.3	7.946.000	3.495.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	428.462.694	155.933.000
Beban Pemeliharaan	D.5	67.458.705	24.191.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.286.569.862	4.081.800
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	173.141.484	132.919.396
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		4.115.550.821	1.365.563.268
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.115.550.821)	(1.365.563.268)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Nonlancar	D.12	-	27.389.000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional lainnya		88.000.000	34.988.900
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		88.000.000	62.377.900
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.027.550.821)	(1.303.185.368)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.027.550.821)	(1.303.185.368)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL		1.830.441.987	2.077.599.911
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.027.550.821)	(1.303.185.368)
KOREKSI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(88.000.000)	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		4.113.803.135	1.170.265.972
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(381.244.813)	-
EKUITAS AKHIR		1.916.694.301	1.944.680.515

(Dal
am
Rupi
ah)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

*Dasar Hukum E
ntitas
dan Rencana St
rategis*

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa **"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"**. Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2024 tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2024 disusun sebagai acuan bagi penyusunan Renstra Unit Eselon I/II dan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

A. 1. 1. Visi, Misi dan Tujuan

Untuk memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan visi, misi dan tujuan, yaitu :

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang Berkualitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Misi

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.
3. Memperkuat Kedudukan Organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Mengelola Data Pemilihan Umum dan Pemilihan

Kepala Daerah yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah.

5. Melaksanakan dan mensosialisasikan Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan Partisipatif.
6. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.
7. Melayani Peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara Adil.
8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksanaan Tugas Organisasi.

c. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan terlaksananya misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL, serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat yang Tinggi tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara Murni dan Konsekuen.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau hargawajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan asset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2 s.d. 40 tahun
Aset Tetap lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang

adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

TABEL 5 Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neracaper 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan Rp.
20.862,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan berasal dari pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Perpajakan	-	-	0,00%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0,00%
Pendapatan Hibah	-	-	0,00%

*Realisasi Belanja
Negara
Rp. 1.204.333.959,-*

B.2. Belanja

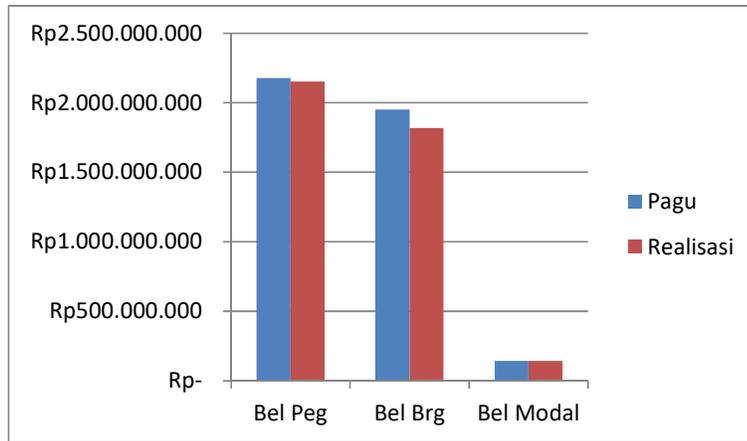
Realisasi belanja instansi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.114.358.135,- atau 96,26 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.272.033.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Rutin Anggaran 076 TA 2022

Belanja Pegawai	2.179.373.000	2.151.972.076	98,74%
Belanja Barang	1.950.929.000	1.819.164.261	93,25%
Belanja Modal	143.731.000	142.666.798	99,26%
Jumlah	4.274.033.000	4.113.803.135	96,25%

Komposisi anggaran belanja rutin anggaran 076 dapat dilihat dari grafik berikut:

Komposisi Anggaran Rutin 076



Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi anggaran belanja untuk periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Total Realisasi Belanja Rutin TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	Realisasi Anggaran 31 Desember 2022	% Realisasi	Realisasi Anggaran 31 Desember 2021	% Realisasi	Naik (Turun) Realisasi Anggaran %	Naik (Turun) Serapan %
Belanja Pegawai	2.151.972.076	98,74%	2.070.116.362	98,98%	3,95%	-0,24%
Belanja Barang	1.819.164.261	93,25%	545.662.345	91,01%	233,39%	2,24%
Belanja Modal	142.666.798	99,26%	0	0%	99,26%	99,26%
Jumlah	4.113.803.135	50,03%	2.615.778.707	30,47%	57,27%	64,19%

Belanja Pegawai
Rp. 1.053.429.854,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk Semester II berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1,053,429,854,- dan Rp. 1.044.943.072 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,62persen dari realisasi belanja TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2022 dan TA 2021*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.151.972.076	2.071.376.362	3,89
Jumlah Belanja Kotor	2.151.972.076	2.071.376.362	3,89
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	2.151.972.076	2.071.376.362	3,89

Belanja Barang
Rp.150.904.105,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Anggaran Belanja Barang anggaran 076 untuk semester yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.409.862.900,- dan Rp. 545.662.345,-. Realisasi Anggaran Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar -135.788.445 dari realisasi belanja barang 31 Desember 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun 2022 dan pembatasan penggunaan anggaran oleh KPU RI.

*Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Belanja Barang Non Operasional	214.399.800	92,99%	545.662.345	91,01%	-60,71%
Belanja Barang Persediaan	36.673.000	55,91%	0	0,00%	100,00%
Belanja Barang Operasional	158.790.100	99,75%	0	0,00%	100,00%

Belanja Modal
Rp. 142.666.798,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.666.798,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	142.666.798	0	100%
Jumlah Belanja	142.666.798	0	100%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal Tanah
Rp.43670.348,-*

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.670.348,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	43.670.348	0	-
	43.670.348	0	-
Jumlah Belanja	43.670.348	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 98.996.450,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 98.996.450,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	% Realisasi	REALISASI 31 Desember 2021	% Realisasi	NAIK (TURUN) % Realisasi
Belanja Modal Peralatan	98.996.450	97,63%	0	0,00%	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	98.996.450	97,63%	0	0,00%	0,00%
Jumlah Belanja	98.996.450	97,63%	0	0,00%	0,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk semester yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah 48.000.000,- dan Rp. 50.400,000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan keKas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bank BNI KCP Tuapejat	-	-
Uang Tunai dan SPJ Blm di GU kan	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
PenerimaanRp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- danRp. 0,-.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0,-*

Saldo Kas Lainnya danSetara Kas untuk semester

berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021*

Jenis	21-Dec-22	31-Dec-21
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	0	0
Pajak PPh yang belum disetor	0	0
Kegiatan yang belum di SP2hl kan	0	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	0	0
Jumlah	-	-

C.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak Rp.0,-*

Saldo Piutang PNBPN untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang PNBPN	-	-

Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1		-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp.0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian bagian lancar adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar TPA
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Nama	31 Desember 2021	30 Juni 2020
1		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

*Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp.0,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka Rp.0,-*

Saldo Belanja Dibayar di Muka untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	21-Dec-22	21-Dec-21
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,-

C.9 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Merupakan hak pemerintah yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	21-Dec-22	21-Dec-21
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.37.901.010,-*

C.10 Persediaan

Nilai persediaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.36.673.000,- dan Rp.40.311.845,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagaiberikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Persediaan	21-Dec-22	21-Dec-21
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan	36.673.000	40.311.845
Jumlah	36.673.000	40.311.845

Tagihan TP/TGR

Rp.0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TP/TGR
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Debitur	21-Dec-22	21-Dec-21
1	-	-	-
Jumlah		-	-

TPA Rp.0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Debitur	21-Dec-22	21-Dec-21
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –Piutang
Jangka Panjang

Rp.0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR	-		
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.380.000.000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 423.670.348,- dan Rp. 380.000.000,-.

Rincian saldo Tanah untuk semester berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2022

1	2500 m ²	Jln. Raya Tuapejat Km 7	423.670.348
Jumlah			

Penambahan nilai aset tanah ini karena adanya revaluasi aset tetap yang dilaksanakan pada tahun 2020. Nilai revaluasi aset tersebut adalah Rp. 380.000.000,-

Peralatan dan
Mesin
Rp.2.369.664.800

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.468.661.250,- dan Rp. 2.389.500.800,-. Rincian tersebut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31

Desember 2021

Jenis	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET TETAP	-	-
Peralatan dan Mesin	2.468.661.250	2.389.500.800
	-	-
Jumlah	2.468.661.250	2.389.500.800

Gedung dan
Bangunan
Rp.
1.209.346.498,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 1.209.346.498,- dan Rp.1.209.346.498,-. Rincian tersebut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	30 Juni 2022	30 Juni 2021
ASET TETAP	-	-
Gedung dan Bangunan	1.209.346.498	1.209.346.498
	-	-
Jumlah	1.209.346.498	1.209.346.498

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Mutasi transaksiterhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Akumulasi
penyusutan
Aset Tetap
Rp.(2.339.611.805,-)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (2.339.611.805,-) dan Rp. (2.166.470.321,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk semester berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.369.664.800	(2.146.649.323)	223.015.477
2	Gedung dan Bangunan	1.209.346.498	108.841.185	1.100.505.313
3	Tanah	423.670.348	0	423.670.348
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan			(2.037.808.138)	

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Aset Lain-Lain
Rp.0,-

Uraian	Nilai
-	0
-	0
Jumlah	0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain

Saldo untuk semester berakhir 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp.0,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk semester berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN Rp.0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang pihak ketiga untuk KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi secara by system, dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki utang kepada pihak ketiga.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	-	

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
	-
Total	-

*Ekuitas
Rp.1.828.694.301,
-*

C.27 Ekuitas

Ekuitas untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,828,694,301,- dan Rp. 1.830.441.987,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP
Rp.0,-*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk semester yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Rincian Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk semester berakhir

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	30 Juni 2022	% Realisasi	31 Des 2022	% Realisasi	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Jumlah	-		-		

Beban Pegawai

Rp.

2.151.972.076,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.151.972.076,- dan Rp. 2.070.116.362,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Secara jumlah realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 3,95 %.

*Rincian Beban Pegawai semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.151.972.076	2.070.116.362	3,95%
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	0,00%
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00%
Beban Lembur	0	0	0,00%
Jumlah	2.151.972.076	2.070.116.362	3,95%

*Beban
Persediaan
Rp.0,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.964.000,- dan Rp. 17.742.100,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7.946.000	17.724.100	-55%
Beban Persediaan Bahan Bahan Baku	0	0	0%
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0%
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0%
Jumlah Beban Persediaan	7.946.000	17.724.100	-5517%

D.4 Beban Barang Jasa

Beban Jasa Rp.
363.486.416,-

Jumlah Beban Jasa untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 363.486.416,- dan Rp. 393.262.753,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	33.016.600	216.785.000	-84,77%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	132.500	320.000	-58,59%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	94.260.000	95.410.000	-1,21%
Beban Barang Operasional- Penanganan COVID-19	12.620.000	23.530.500	-46,37%
Beban Bahan	111.512.300	7.235.000	1441,29%
Beban Honor Output Kegiatan	84.850.000	3.600.000	2256,94%
Beban Jasa lainnya	26.996.016	46.082.235	-41,42%
Beban Jasa-Penanganan COVID-19	99.000	300.000	-67,00%
Jumlah	363.486.416	393.262.735	-7,57%

Beban
Pemeliharaan
Rp. 67.458.705,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.67.458.705,- dan Rp. 74.237.517,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.132.000	12.846.000	-5,56%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.326.705	61.391.517	-9,88%
Jumlah	67.458.705	74.237.517	-9,13%

Beban

Perjalanan Dinas

Rp.1.286.569.86

2,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.286.569.862,- dan Rp. 25.623.700,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	1.286.569.862	25.623.700	4921,02%
Jumlah	1.286.569.862	25.623.700	4921,02%

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
173.141.484,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.173.141.484,- dan Rp.235.293.788,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.954.554	211.106.858	-29,44%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.186.930	24.186.930	0,00%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Penyusutan dan Amortisasi	173.141.484	235.293.788	-26,41%

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban Lain-lain
Rp.0,-*

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Lain-lain semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

s

*Surplus / Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk semester 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pelepasan aset non lancar	0	0	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	-
Beban dari pelepasan aset non lancar	0	0	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa semester berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	-	-

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
1.828.694.301,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.

1.828.694.301,- dan Rp. 1.830.441.987,-.

*Defisit LORp.(
4.027.550.821).*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk semester yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.(4.027.550.821) dan Rp.(2.783.735.602). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk semester berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,-*

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker di Jl. Raya Tuapejat KM.7 Gang

Kamboja Kecamatan Sipora UtaraKabupaten Kepulauan Mentawai.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0,-*

E.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-Lain
Rp.0,-*

E.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp. 4.113.803.135,-

E.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.113.803.135,- dan Rp. 2.553.400.814,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.113.803.135
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.113.803.135

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Rp. (0) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp. 4.113.803.135,-

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.0,-

,sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.113.803.135,-

Transfer Masuk Rp.
0,-

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Keluar Rp.
0,-

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- danRp. 0,-

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp.0,-.

E.8 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp.
1.828.694.301,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.828.694.301,- dan Rp. 1,830,441,987,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

2.1 Tanah

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai saat sekarang masih belum memiliki sertifikat atas nama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2 Pengelola Keuangan

Sesuai dengan SK Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan mentawai Nomor: 5 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Pengangkatan Dan Pembayaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para Pengelolakeuangan tersebut adalah :

1	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Irman Susanto
2	Pejabat Pembuat Komitmen	:	Muslimin
3	Pejabat Penandatanganan SPM	:	Wahyudi Pratama
4	Bendahara Pengeluaran	:	Adel Putra. M
5	Pengelola Keuangan	:	Immanuel Laurence
			Suyanto

2.2 Rekening Pemerintah

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki satu rekening bendahara pengeluaran yaitu rekening pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 9890766561971000 atas nama rekening KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

